



Merugikan Negara

RENCANA Bulog untuk membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah tidak lepas dari impor ugat-ugalan yang dilakukan mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Dua puluh ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog terpaksa dimusnahkan karena mengalami penurunan mutu atau disposal stock.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, nilai beras disposal itu mencapai Rp160 miliar dengan asumsi harga rata-rata pembelian di tingkat petani sebesar Rp 8.000 per kilogram

Buntut dari kasus ini adalah Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita disebut-sebut jadi biang keladi banyaknya beras impor yang ada di Perum Bulog akan dibuang lantaran busuk. Tagar #TangkapEnggar pun trending di Twitter.

Mismanajemen ini benar-benar merugikan negara. Tak tanggung-tanggung nilainya mencapai Rp 160 miliar.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 38 Tahun 2018, CBP memang dapat dibuang jika telah melampaui batas waktu simpan minimum empat bulan atau berpotensi mengalami penurunan mutu.

Saat ini, 100 ribu dari 2,3 juta ton beras yang tersimpan di gudang Bulog berusia di atas 4 bulan. Bahkan, sekitar 20 ribu ton beras memiliki usia simpan di atas 1 tahun dan mau tidak mau harus dimusnahkan. Meski demikian, disposal itu belum bisa dieksekusi karena tak tersedianya anggaran.

Tentu yang menjadi pertanyaan besarnya nilai disposal turut dipengaruhi pengadaan beras yang berlebihan oleh pemerintah. Terutama, importasi beras yang mencapai 2,25 juta ton sepanjang 2018 naik tajam dari tahun 2017 dan 2016 yang hanya 0,71 ton dan 1,28 ton.

Apakah mungkin karena pengadaan yang berlebihan di tahun 2018 terutama dari impor beras. Ada kaitannya dengan polemik data beras 2018 ketika ada debat harus impor atau tidak.

Perkara ini juga sempat diungkap Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, pada Mei 2019 lalu. Dari 1,8 juta ton beras yang diimpor Bulog tahun 2018, kata dia, hanya 150 ribu ton yang terserap untuk menjaga stabilitas harga.

Ia menyarankan agar pemerintah tak lagi mengulangi kesalahan data beras seperti di tahun 2018. Selain menggunakan data BPS, ia mengingatkan keputusan impor tidak dilakukan tergesa-gesa sehingga berujung pada kelebihan stok.

Keadaan ini harusnya dikaji lebih jauh karena ditekankan ada hal yang tak beres termasuk kajian terkait penyebab stok beras sampai tidak layak dan mesti dimusnahkan. Termasuk pula kaitannya dengan ada tidaknya impor beras beserta harga yang ditetapkan atas beras Indonesia di dalam dan di luar negeri juga perlu dikaji.

Berbagai langkah perbaikan juga perlu dilakukan Bulog terutama dalam manajemen barang pertama datang lalu yang pertama keluar, pengaturan suhu dan lingkungan gudang serta pengemasan beras. (*)